

SKRIPSI



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS-RBA) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DPMPTSP KOTA TANGERANG

Disusun oleh:

Nama : Antono Saddam Khadafi
NPM : 2012011115
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS-RBA)
DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI
DPMPTSP KOTA TANGERANG**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Terapan

Oleh:

Nama : ANTONO SADDAM KHADAFI
NPM : 2012011115
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Program Studi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
Konsentrasi : KEBIJAKAN PUBLIK

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN**

NAMA : Antono Saddam Khadafi
NPM : 2012011115
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara
JUDUL : Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Berusaha *Online Single Submission Risk Based
Approach* (Oss-Rba) di DPMPTSP Kota
Tangerang

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 21 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Alih Aji Nugroho, SAP., MPA

NIP. 19920525018011002

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada *11. juli 2024.*

Ketua merangkap Anggota



[Signature]
(Dr. Ridwan Rajab, M.Si)

Sekretaris merangkap Anggota

[Signature]

(Retnayu Prasetyanti, SAP., MAP.)

Anggota

[Signature]

(Dr. Alih Aji Nugroho S.AP., MPA)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Antono Saddam Khadafi

NPM : 2012011115

Jurusan : Adminsitasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul implementasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha *online single submission risk based approach* (OSS-RBA) di DPMPTSP Kota Tangerang merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 26 Juni 2024

Peneliti,



Antono Saddam Khadafi

NPM 2012011115

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rahmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, telah menjadi alasan dari Tugas Akhir skripsi dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) di DPMPTSP Kota Tangerang” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana terapan Administrasi Pembangunan Negara pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga peneliti yang senantiasa selalu memberikan doa serta dukungan selama menempuh pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Ibu Nila Kurniawati, SAP., MAP. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara;
4. Dr. Alih Aji Nugroho S.AP., MPA, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir skripsi yang telah memberikan arahan dan juga dukungan kepada peneliti dari mulai penyusunan judul terkait skripsi sampai kepada penyelesaian tugas akhir skripsi.
6. Retnayu Prasetyanti SAP., MAP. Selaku Dosen Pendamping Akademik.
7. Asep Zulfikar, S.IP Selaku Kepala Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
8. Nasron Aziz Mufti, S.IP Selaku Kepala Koordinator bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

9. Ir. H.Yosgundarno, MM selaku Kepala Koordinator bidang Pengelolaan Data dan Advokasi yang telah membantu memberikan referensi kepada peneliti terkait instansi tempat pelaksanaan Tugas Akhir skripsi;
10. Seluruh pegawai yang berada pada Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman modal yang telah senantiasa untuk memberikan pengalaman dan ilmu selama peneliti melaksanakan penelitian Tugas Akhir skripsi;
11. Ardriansyah Daniswara, S.Ked selaku sahabat dan orang yang membawa peneliti untuk merekomendasikan pelaksanaan tugas akhir skripsi di DPMPTSP Kota Tangerang;
12. Teman-teman kelas D Prodi APN yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir.

Peneliti menyadari akan masih banyaknya kekurangan dari penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembaca.

Jakarta, 26 Juni 2024

Peneliti

Antono Saddam Khadafi

NPM: 2012011115

ABSTRAK

Antono Saddam Khadafi, 2012011115

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS-RBA) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DPMPTSP KOTA TANGERANG”

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) merupakan salah satu inovasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi. Dinas Penanaman Modal atau DPMPTSP Kota Tangerang bisa dengan baik menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang tertulis. Peneliti memiliki tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, serta ketepatan lingkungan pada implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang. Penggambaran implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang sebagai dinas investasi tingkat kota terbaik di Indonesia diharapkan bisa menjadi acuan dari instansi tingkat kota lainnya. Metode penelitian yang ada pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori empat (4) ketepatan implementasi kebijakan dari Richard E. Matland untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan OSS-RBA pada pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kota Tangerang. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Tangerang sudah baik, terutama karena kebijakan yang dikeluarkan sudah memenuhi aspek ketepatan kebijakan, pelaksanaan yang dilakukan sudah tepat sesuai ketepatan pelaksanaan, target dari kebijakan ini sudah sesuai dan mencapai ketepatan target, dan lingkungan dari kebijakan ini sangat mendukung implementasi kebijakan ini. Permasalahan yang ditemukan dari implementasi kebijakan ini hanya sebatas peningkatan sistem, pola kerja internal, serta sosialisasi aplikasi OSS-RBA kepada masyarakat. Hal terkait solusi yang diajukan oleh peneliti adalah seperti pembangunan sistem manajemen pengetahuan dan juga membuka pola komunikasi yang lebih efisien untuk bisa mengurangi kesalahan komunikasi antar instansi penyelenggara kebijakan sistem OSS-RBA.

Kata Kunci: OSS-RBA; Implementasi Kebijakan; Investasi; Pelayanan Publik; DPMPTSP.

ABSTRACT

Antono Saddam Khadafi, 2012011115

***“IMPLEMENTATION OF THE ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK
BASED APPROACH (OSS-RBA) POLICY IN BUSINESS LICENSING
SERVICES IN TANGERANG CITY DPMPTSP”***

The Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) policy is one of the innovations issued by the government to encourage ease of investment. The Tangerang City Investment Office or DPMPTSP can properly implement the policy in accordance with the written rules. The researcher aims in this study to find out how the aspects of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy in the implementation of the OSS-RBA policy at DPMPTSP Tangerang City. The description of the implementation of the OSS-RBA policy at DPMPTSP Tangerang City as the best city-level investment agency in Indonesia is expected to be a reference for other city-level agencies. The research method in this study is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique of this research is through interviews, observations, and document studies. The theory underlying this research is the theory of four (4) accuracy of policy implementation from Richard E, Matland to see how the implementation of the OSS-RBA policy in business licensing services at DPMPTSP Tangerang City. The results of this research analysis show that the policy implementation carried out by DPMPTSP Tangerang City is good, mainly because the policy issued has fulfilled the aspects of policy accuracy, the implementation carried out is appropriate according to the accuracy of implementation, the target of this policy is appropriate and reaches the accuracy of the target, and the environment of this policy is very supportive of the implementation of this policy. The problems found from the implementation of this policy are only limited to improving the system, internal work patterns, and socializing the OSS-RBA application to the public. Related solutions proposed by researchers are such as the development of a knowledge management system and also opening more efficient communication patterns to reduce communication errors between agencies implementing the OSS-RBA system policy.

Keywords: *OSS-RBA; Policy Implementation; Investment; Public Service; DPMPTSP.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME (TURNITIN)	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Kebijakan, Konsep dan Teori	8
B. Konsep Kunci	26
C. Kerangka Berpikir	27
BAB III	30
METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Metode Penelitian.....	30
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data	37
BAB IV.....	41
HASIL PENELITIAN.....	41

A. Penyajian Data	41
B. Pembahasan.....	60
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	69
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
Daftar Pustaka	80
LAMPIRAN	84



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

TABEL 3. 1 Key informant.....	35
TABEL 3. 2 Matriks Perkembangan Instrumen.....	36



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Kebijakan menurut Ripley	14
Gambar 2. 2 diagram pelayanan publik yang berkualitas menurut Albrecht & Zemke	25
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Tangerang.....	42
Gambar 4. 2 Data grafik target dan realisasi investasi Kota Tangerang tahun 2019-2023	44
Gambar 4. 3 kegiatan pelatihan internal terkait OSS.....	57
Gambar 4. 4 Dokumentasi konsultasi secara langsung di kantor DPMPTSP Kota Tangerang	59
Gambar 4. 5 Pelatihan trainer OSS-RBA oleh BKPM RI.....	68



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah negara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap lembaga tata usaha negara, korporasi, lembaga mandiri yang didirikan berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik, dan badan hukum lainnya semata-mata untuk pelayanan kegiatan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sebuah isu kebijakan yang kian tahun menjadi semakin strategis karena upaya perbaikannya terus dilakukan, namun hasilnya seperti berjalan di tempat. Pelayanan publik pada dasarnya memiliki implikasi yang sangat luas karena memiliki pengaruh hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat. Tuntutan perubahan tak henti disuarakan oleh masyarakat, terutama dari sisi birokrat yang pada dasarnya memiliki tugas untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Perizinan menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang masuk pada bidang administrasi. Perizinan berusaha menjadi salah satu bentuk layanan administratif yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pelayanan ini menjadi sebuah pelayanan yang memiliki pengaruh pada jalannya roda perekonomian di Indonesia. Untuk mendapatkan izin berusaha, pemilik usaha harus mengikuti rangkaian prosedur administrasi yang sangat ketat karena sebagian besar prosesnya masih secara manual. Pelayanan manual yang terjadi ternyata memberikan dampak negatif bagi pengguna prosedur, sehingga menjadi kurang efisien dan efektif. Melihat situasi permasalahan yang terjadi, pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berusaha untuk merombak dan memangkas sistem administrasi yang bermasalah.

Pada perspektif investasi, Indonesia yang merupakan salah satu negara tujuan investasi strategis bagi para investor luar dan dalam negeri tentunya harus bisa terus dioptimalkan daya saingnya di dunia internasional. Daya saing Indonesia pada dasarnya memang terus meningkat di taraf internasional, hal ini didukung oleh melimpahnya sumber daya alam hayati dan non hayati, Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjoyo (2020) ternyata melimpahnya sumber daya baik hayati maupun non hayati belum mampu mengoptimalkan pemasukan investasi bagi Indonesia. Hal yang dianggap menghambat perkembangan dan optimalisasi investasi tersebut di Indonesia adalah mengenai kurangnya keberpihakan terhadap investor dari segi waktu yang relatif panjang dan menghabiskan tenaga maupun nominal biaya yang terus berjalan seiring pengurusan perizinan tersebut. Sementara tanpa memiliki perizinan ini, para investor atau pengusaha tidak bisa menginvestasikan modalnya di Indonesia dan juga para pengusaha tidak memiliki perizinan yang berguna untuk menunjang kegiatan usahanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 melahirkan sebuah inovasi sistem layanan *Online Single Submission* (OSS-RBA) yang menjadikan layanan persetujuan usaha dan investasi terintegrasi secara elektronik antara lingkup pemerintah daerah atau provinsi dengan departemen dan lembaga manapun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi lembaga yang pengelola sistem tersebut, mereka akan mengontrol jalannya sistem ini secara terpusat. Sistem ini membuat izin usaha dan investasi diberikan lebih cepat, serta proses perizinan dikelola langsung oleh pusat. Sistem OSS-RBA ini ditujukan untuk mengelola perizinan bagi pengusaha atau investor yang bersifat perusahaan atau perorangan, perusahaan disini dimaksudkan untuk skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Segala proses administratif dalam perizinan mengajukan izin usaha akan dipindah menjadi mekanisme *Online* sehingga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan izin usaha karena mereka hanya perlu mengunjungi halaman internet oss.go.id. Peraturan ini yang telah berjalan sejak diterbitkan dari tahun 2018 ternyata memberikan pengaruh yang sangat signifikan. OSS-RBA sebagai sarana penunjang EODB (*Ease Of Doing Bussiness*) memberikan pengaruh untuk

memberikan kemudahan perizinan di Negara Indonesia ini. Berdasarkan data dari (World Bank, 2019), peringkat EODB Indonesia terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, peningkatan peringkat ini juga tentunya salah satunya dipengaruhi oleh adanya terobosan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui OSS-RBA ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang merupakan salah satu instansi yang menjalankan sistem pelayanan satu pintu untuk pelayanan perizinan berusaha secara elektronik menggunakan sistem OSS-RBA. Implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA di Kota Tangerang ini menjadi bentuk dalam proses terbentuknya sebuah kebijakan. Proses implementasi akan berjalan setelah kebijakan melewati beberapa tahapan pembuatan kebijakan seperti formulasi dan juga pengesahan kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi bentuk aksi nyata dari bagian realisasi kebijakan yang baru saja diterbitkan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Hal ini juga yang seharusnya terjadi pada proses implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang. Pada fakta lapangan yang didapat oleh peneliti dari observasi lapangan, terkadang pihak DPMPTSP Kota Tangerang tidak mengetahui solusi dari masalah yang diajukan oleh masyarakat saat menggunakan sistem OSS-RBA. Hal ini menyiratkan adanya sebuah masalah dalam proses implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang, karena DPMPTSP Kota Tangerang merupakan implementor tingkat kota dari kebijakan OSS-RBA ini. Permasalahan pada implementasi kebijakan OSS-RBA ini harus menjadi perhatian penting, mengingat Perizinan berusaha merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk para pelaku usaha. Kebijakan ini akan berguna untuk membuat alur perizinan berusaha menjadi efisien dan efektif sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha yang dapat membantu mereka menjalankan usaha serta kegiatan berusaha mereka. Mengingat investasi menjadi salah satu sektor penting bagi Indonesia, maka perlu sekali adanya keterkaitan dan koordinasi yang baik antar lembaga untuk

menjalankan fungsi pelayanan yang berkaitan dengan investasi ini. Untuk mendukung percepatan dan peningkatan kegiatan penanaman modal, dan berusaha, rangkaian perizinan berusaha sedang dalam proses penataan ulang kembali sehingga diharapkan bisa menjadi sebuah pendukung dan bukan malah sebaliknya yaitu sebagai sebuah hambatan. DPMPTSP Kota Tangerang selaku lembaga yang memiliki kewenangan atas pengeluaran izin berusaha atau kegiatan berusaha di Kota Tangerang juga terus melakukan upaya penyempurnaan termasuk dengan menjalankan sistem OSS-RBA sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018.

Lembaga DPMPTSP di beberapa daerah juga tentunya telah melaksanakan pelayanan dengan sistem OSS-RBA ini, seperti di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan penelitian dari (Puspitasari et al., 2023) yang menggunakan dua metode penyampaian informasi untuk mendorong implementasi sistem OSS-RBA disana, yaitu dengan media daring dan tatap muka namun ternyata karakteristik para pelaku usaha disana yang kebanyakan sudah berumur dan sosialisasi yang belum merata membuat implementasi sistem ini terhambat. Serta dari sisi sumber daya di Kabupaten Sidoarjo masih kurang terkait pelatihan sumber daya manusia, sehingga para implementor yang seharusnya menjadi pendamping dalam pelaksanaan sistem OSS-RBA ini sudah terlatih, tetapi malah menjadi hambatan tersendiri dalam proses Implementasi.

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh (KPPOD, 2019) (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), penerapan sistem pelayanan integrasi OSS-RBA memiliki beberapa aspek yang menjadi penting untuk bisa diperhatikan, yaitu aspek regulasi, sistem dan tata laksana. Mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2018 tujuan dari adanya OSS-RBA ini adalah untuk mempermudah dan memangkas birokrasi terhadap perizinan berusaha, namun *INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)* melihat adanya peluang miskoordinasi antar lembaga khususnya DPMPTSP dengan BKPM. Ketidakejelasan sistem koordinasi antar daerah juga membuat integrasi perizinan berusaha menjadi terhambat (Saputra Dany, 2021). Pemerintah Indonesia yang dalam lima tahun terakhir berupaya untuk

mendorong EODB juga di tahun 2021 mengeluarkan regulasi cipta kerja, dimana terbitnya aturan baru ini membuat beberapa perubahan paradigma yang berdampak kepada regulasi, kelembagaan, dan platform layanan di pusat maupun daerah. Adanya aturan ini juga tentunya perlu disesuaikan dengan beberapa aturan sebelumnya seperti penerbitan OSS-RBA di tahun 2018. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat pernyataan dari *INDEF* sebelumnya yang menyatakan aspek regulasi, sistem dan tata laksana menjadi aspek yang punya peluang menghambat implementasi OSS-RBA di Indonesia. Kota Jakarta yang menjadi daerah cerminan kemudahan berusaha di Indonesia tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya di Kabupaten Sidoarjo yang secara luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat pembangunan berbeda jauh dengan Jakarta yang menjadi Ibukota Indonesia.

Melihat implementasi OSS-RBA di DKI Jakarta tentunya sangat berbeda jauh, karena pemerintah provinsi DKI Jakarta langsung merespon dengan cepat adanya *Launching* OSS-RBA, dimana pemprov DKI langsung mengeluarkan aturan turunan untuk mendukung jalannya implementasi OSS-RBA di Jakarta. DPMPTSP Jakarta juga langsung berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait dalam upaya harmonisasi pelaksanaan PTSP dengan UU Cipta Kerja. Upaya cepat ini menjadi sebuah respon baik untuk mencegah ketidakpastian dan kegamanagan dalam proses perizinan. Terbitnya regulasi Cipta Kerja ini menuntut model birokrasi yang sederhana dengan kualitas SDM yang mumpuni, hal ini akan mendorong efektivitas dan efisiensi. DPMPTSP DKI Jakarta juga memiliki pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan program sosialisasi serta komunikasi yang baik untuk mendorong implementasi sistem OSS-RBA ini secara baik. DPMPTSP DKI Jakarta memiliki program AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) yaitu program jemput bola untuk pelayanan OSS-RBA, layanan pengaduan sampai dengan tingkat kelurahan, serta layanan pendukung apabila sistem OSS-RBA bermasalah. Permasalahan *Capacity Constraint* menjadi sebuah tantangan bagi pemda dalam melakukan implementasi kebijakan sistem OSS-RBA, selain itu ketidaksempurnaan regulasi serta sistem digital menjadi aspek yang penting untuk bisa disempurnakan sehingga

implementasi OSS-RBA berjalan dengan baik. Pemerintah juga diharapkan terbantu dengan adanya sistem OSS-RBA ini karena akan memudahkan fungsi pengawasan mereka kepada pelaku usaha.

Melihat beberapa persoalan dan kebermanfaatan dari penerapan sistem OSS-RBA di beberapa Kota yang ada di Indonesia, tentunya dapat dijadikan acuan untuk penyempurnaan penerapan yang sebagaimana harusnya pada implementasi sistem OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang. Pada penelitian yang berlangsung saat ini, akan berbeda dengan kajian sebelumnya. peneliti akan berfokus menganalisa proses implementasi kebijakan sistem OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang sebagai salah satu dinas investasi tingkat kota terbaik di Indonesia dengan teori empat (4) ketepatan implementasi dari Richard E, Matland. Peneliti akan mencoba memahami pendapat para pelaku usaha yang menjadi sasaran dari program OSS-RBA terkait pelaksanaan sistem ini. Penelitian yang dijalankan akan berfokus pada DPMPTSP Kota Tangerang serta para pelaku usaha yang menjadi sasaran pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang. Hal tersebut memiliki tujuan, mampu memberikan kesempatan atau peluang bagi peneliti dalam mendapatkan pemahaman dari 2 (dua) perspektif yaitu selaku implementor kebijakan dan sebagai sasaran kebijakan.

B. Rumusan Permasalahan

Penulisan ini akan memiliki fokus permasalahan terkait keberlangsungan implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, serta ketepatan lingkungan pada implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, serta ketepatan lingkungan pada implementasi kebijakan OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan, baik itu secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya pengetahuan terkait implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA oleh DPMPTSP di Kota Tangerang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan terbaru terhadap implementasi kebijakan karena peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait implementasi pelayanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA oleh DPMPTSP di Kota Tangerang.
- b. Bagi kampus, penelitian yang dilakukan dapat memberikan peluang menjalin hubungan kerja sama dengan instansi dalam meningkatkan kerja sama untuk saling mendukung keberhasilan proyek penelitian tugas akhir perkuliahan.
- c. Bagi Instansi, penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan hasil atau informasi yang bisa dijadikan masukan atau evaluasi dalam rencana praktik implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA ini yang lebih baik dan optimal.